



KABUPATEN BIAK NUMFOR



LKIP 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor serta penjelasan tentang capaian kerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor. Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *clean government & good government*.

Informasi tingkat keberhasilan atau kinerja (*performance*) Kabupaten Biak Numfor selama Tahun 2020 diukur berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja program dengan indikator capaian tertentu yang ditetapkan di dalam RPJMD sebagai tolak ukur analisis capaian kinerja dimaksud.



Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi media informasi eksternal publik sekaligus menjadi alat koreksi internal penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. Disadari bahwa berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas serta upaya implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ke depan, namun dengan keyakinan dinamis, inspiratif, inovatif serta keinginan dan kemauan untuk berubah terus menjadi lebih baik, bersama dan bersatu hati kita bisa jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang keberhasilan di masa datang.

Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Biak, 23 Maret 2021

BUPATI BIAK NUMFOR

HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor 2019-2023 merupakan kebijakan yang mengatur penyempurnaan indikator kinerja, dalam RPJMD telah ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sasaran yang telah dilakukan pengukuran telah berhasil dicapai dengan "Sangat Berhasil" yaitu 138%.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kabupaten Biak Numfor, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	1
C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	3
D. PERANGKAT DAERAH	6
E. SUMBER DAYA APARATUR.....	9
F. SUMBER DAYA KEUANGAN	13
G. ISU-ISU STRATEGIS.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. VISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023.....	23
B. MISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023.....	24
C. PERENCANAAN KINERJA KAB. BIAK NUMFOR TA. 2020	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B. REALISASI ANGGARAN	76
BAB IV PENUTUP	90
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2020.....	5
1.2 JUMLAH ASN KAB. BIAK NUMFOR BERDASARKAN JENIS KELAMIN	9
1.3 JUMLAH ASN KABUPATEN BIAK NUMFOR BERDASARKAN GOLONGAN	9
1.4 JUMLAH ASN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....	11
1.5 JUMLAH ASN BERDASARKAN JENIS JABATAN	11
1.6 JABATAN STRUKTURAL ASN KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020.....	12
1.7 APBD KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020	13
2.1 MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023.....	24
2.2 PERJANJIAN KINERJA BUPATI BIAK NUMFOR TAHUN 2020	26
3.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2020.....	29
3.2 REALISASI INDIKATOR SASARAN 1 TAHUN 2019.....	30
3.3 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 1 TERHADAP TARGET RPJMD.....	33
3.4 REALISASI INDIKATOR SASARAN 2 TAHUN 2020.....	33
3.5 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 TERHADAP TARGET RPJMD.....	35
3.6 REALISASI INDIKATOR SASARAN 3 TAHUN 2020.....	37
3.7 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 3 TERHADAP TARGET RPJMD.....	37
3.8 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 3 TAHUN 2020.....	37
3.9 REALISASI INDIKATOR SASARAN 4 TAHUN 2020.....	43
3.10 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 4 TERHADAP	



TARGET RPJMD.....	53
3.11 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 4 TAHUN 2020.....	54
3.12 DATA SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH PERTAMA TERAKREDITASI	55
3.13 REALISASI INDIKATOR SASARAN 5 TAHUN 2020.....	58
3.14 DATA SARANA PRASARANA TANGKAP PER DISTRIK	60
3.15 REALISASI INDIKATOR SASARAN 5 TERHADAP RPJMD.....	61
3.16 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 5 TAHUN 2020.....	61
3.17 REALISASI INDIKATOR SASARAN 6 TAHUN 2020.....	66
3.18 REALISASI INDIKATOR SASARAN 6 TERHADAP TARGET RPJMD ..	67
3.19 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 6 TAHUN 2020	67
3.20 REALISASI INDAKTOR SASARAN 7 TAHUN 2020.....	69
3.21 JUMLAH PESERTA KB.....	70
3.22 REALISASI INDIKATOR KERJA SASARAN 7 TARGET RPJMD.....	72
3.23 PROGRAM ANGGARAN SASARAN 7 TAHUN 2020.....	72
3.24 REALISASI INDIKATOR SASARAN 8 TAHUN 2020	73
3.25 DATA KELOMPOK SANGGAR SENI ATAU SROM DI KABUPATEN BIAK NUMFOR.....	74
3.26 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 8 TERHADAP RPJMD	75
3.27 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020 ...	77
3.28 TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2020 ...	86
3.29 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2020	88



BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan tema pembangunan dan program prioritas Tahun 2020, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor dijabarkan dalam 2 (dua) urusan sebagai berikut:

- 1) Urusan Wajib, yaitu :
 - a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar :
 - ✓ Pendidikan;
 - ✓ Kesehatan;



- ✓ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ✓ Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- ✓ Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas;
- ✓ Sosial.

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar :

- ✓ Tenaga Kerja;
- ✓ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ✓ Pangan;
- ✓ Pertanahan;
- ✓ Lingkungan Hidup;
- ✓ Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- ✓ Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- ✓ Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- ✓ Perhubungan;
- ✓ Komunikasi dan Informasi;
- ✓ Koperasi dan UKM;
- ✓ Penanaman Modal;
- ✓ Kepemudaan dan Olahraga;
- ✓ Statistik;
- ✓ Persandian;
- ✓ Kebudayaan;
- ✓ Perpustakaan dan Arsip;
- ✓ Bencana.

2) Urusan Pilihan, yaitu :

- ✓ Perikanan;
- ✓ Pariwisata;
- ✓ Pertanian;
- ✓ Perindustrian; dan
- ✓ Perdagangan.



- 3) Fungsi Penunjang :
- ✓ Perencanaan;
 - ✓ Keuangan
 - ✓ Kepegawaian dan diklat
 - ✓ Pengawasan

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.

C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1) Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Biak Numfor terletak disebelah utara daratan Papua, tepatnya di Teluk Cendrawasih. Secara astronomi terletak pada $0^{\circ} 55'$ – $1^{\circ} 27'$ Lintang Selatan dan $134^{\circ}47'$ – 136° Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor, serta sekitar 42 pulau-pulau kecil di Kepulauan Padaido.

Kabupaten Biak Numfor secara administrasi berada di wilayah administrasi Provinsi Papua. Luas wilayah Kabupaten Biak Numfor yaitu 2.602 km^2 daratan dan luas wilayah perarian yaitu $19.591.63 \text{ Km}^2$, dan terbagi atas 19 Distrik, 14 Kelurahan dan 257 Kampung.

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Biak Numfor memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Supiori, Samudera Pasifik

Sebelah Timur : Samudera Pasifik

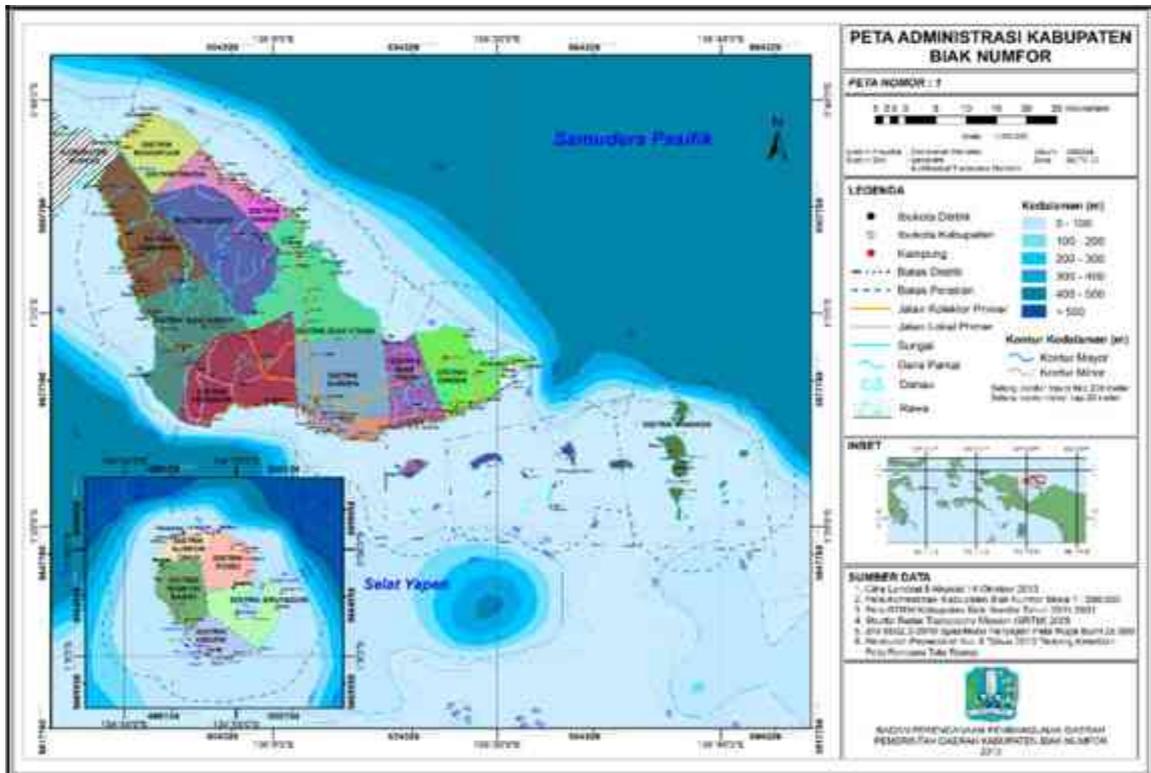
Sebelah Selatan : Selat Yapen

Sebelah Barat : Kabupaten Manokwari



Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Biak Numfor



Sumber Data : RTRW Kabupaten Biak Numfor 2011-2031

2) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 berjumlah sebesar 145.952 jiwa, sebagian besar bermukim dan menetap di Ibukota Kabupaten. Hal ini disebabkan serapan lapangan pekerjaan masih terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten. Dengan luas wilayah 2.602 km², maka tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2020 sebesar 145.952 jiwa atau 39.993 KK. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :



Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	NAMA DISTRIK	JENIS KELAMIN		PENDUDUK (Jiwa)	KELUARGA (KK)
		Laki-Laki (Lk)	Perempuan (Pr)		
1	BIAK KOTA	22.283	22.032	44.315	13.063
2	BIAK UTARA	3.824	3.710	7.534	1.850
3	BIAK TIMUR	4.153	4.008	8.161	2.229
4	NUMFOR BARAT	1.174	1.019	2.193	532
5	NUMFOR TIMUR	933	821	1.754	473
6	BIAK BARAT	3.502	3.206	6.708	1.593
7	WARSA	2.843	2.660	5.503	1.321
8	PADAIDO	1.114	1.033	2.147	567
9	YENDIDORI	4.548	4.304	8.852	2.327
10	SAMOFA	18.144	17.565	35.709	10.453
11	YAWOSI	1.142	1.113	2.255	575
12	ANDEY	1.336	1.241	2.577	577
13	SWANDIWE	2.134	1.959	4.093	927
14	BRUYADORI	1.111	1.040	2.151	448
15	ORKERI	1.046	918	1.964	474
16	POIRU	993	837	1.830	439
17	AIMANDO PADAIDO	1.250	1.182	2.432	661
18	ORIDEK	2.650	2.591	5.241	1.338
19	BONDIFUAR	278	255	533	146
JUMLAH		74.458	71.494	145.952	39.993

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020



D. PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dilakukan perbaikan terkait Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - f. Dinas Perhubungan
 - g. Dinas Perikanan
 - h. Dinas Pariwisata
 - i. Dinas Sosial
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - k. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - o. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
 - p. Dinas Lingkungan Hidup
 - q. Dinas Tenaga Kerja
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - s. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 - t. Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Badan terdiri dari :
- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - f. Badan Pendapatan Daerah
- 6) Distrik terdiri dari :
- a. Distrik Biak Kota
 - b. Distrik Samofa
 - c. Distrik Yendidori
 - d. Distrik Biak Barat
 - e. Distrik Swandiwe
 - f. Distrik Biak Utara
 - g. Distrik Andey
 - h. Distrik Yawosi
 - i. Distrik Warsa
 - j. Distrik Bondifuar
 - k. Distrik Biak Timur
 - l. Distrik Oridek
 - m. Distrik Padaido



- n. Distrik Aimando
- o. Distrik Numfor Timur
- p. Distrik Numfor Barat
- q. Distrik Orkeri
- r. Distrik Poiru
- s. Distrik Bruyadori

7) Kelurahan terdiri dari :

- a. Kelurahan Mandala
- b. Kelurahan Fandoi
- c. Kelurahan Burokub
- d. Kelurahan Waupnor
- e. Kelurahan Saramom
- f. Kelurahan Samofa
- g. Kelurahan Brambaken
- h. Kelurahan Karang Mulia
- i. Kelurahan Yafdas
- j. Kelurahan Snerbo
- k. Kelurahan Sorido
- l. Kelurahan Anjereuw
- m. Kelurahan Mansinyas
- n. Kelurahan Yenures

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terdiri atas 4 UPTD yaitu:

- 1) UPTD Metrologi
- 2) UPTD Loka Latihan Kerja
- 3) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal
- 4) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah kelas C



E. SUMBER DAYA APARATUR

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun pegawai. Hingga Desember tahun 2020, jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mencapai 4.062 orang. Dengan perincian sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jenis Kelamin

Kondisi PNS Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari :

Tabel 1.2

Jumlah ASN Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	2.087
Perempuan	1.975
Jumlah	4.062

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2020

2) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Kondisi PNS Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Pangkat dan Golongan terdiri dari :

Tabel 1.3

Jumlah ASN Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Golongan

Golongan/Ruang	Jumlah
IV/e	0
IV/d	1
IV/c	12
IV/b	54
IV/a	252
Jumlah golongan IV	319



III/d	500
III/c	400
III/b	527
III/a	626
Jumlah golongan III	2.053
II/d	266
II/c	391
II/b	442
II/a	449
Jumlah golongan II	1.548
I/d	55
I/c	65
I/b	14
I/a	8
Jumlah golongan I	142
Total Golongan I,II,II & IV	4.062

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2020

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kondisi jumlah pegawai Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 berdasarkan jenis jabatan adalah sebagai berikut :



Tabel 1.4

Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
S3	2
S2	97
S1	1.288
D.IV	73
D.III	496
D.II	267
D.I	93
SLTA	1.621
SLTP	121
SD	31
JUMLAH	4.062

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2020

4) Berdasarkan Jenis Jabatan

Kondisi jumlah pegawai Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 berdasarkan jenis jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5

Jumlah ASN berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan		Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi	Pimpinan Tinggi Pratama	26
	Administrator	134
Jabatan Administrasi	Pengawas	272
	Pelaksana	1.789
Jabatan Fungsional	Keahlian	586
	Keterampilan	1.255
Jumlah		4.062

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2020



5) Jabatan Struktural

Kondisi Jabatan Struktural pada Setda, Setwan, Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, RSUD, Distrik dan Kelurahan sebagai berikut :

Tabel 1.6

Jabatan Struktural ASN Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020

No.	ESELON	JUMLAH
1	Jabatan Eselon II	35
	Terisi	26
	Lowong/Belum Terisi	9
2	Jabatan Eselon III	191
	Terisi	134
	Lowong/Belum Terisi	57
3	Jabatan Eselon IV	524
	Terisi	272
	Lowong/Belum Terisi	252

Sumber Data: BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2020



F. SUMBER DAYA KEUANGAN

APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 disajikan pada
Tabel berikut :

Tabel 1.7
APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			S/D PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.225.712.623.032,27	0,00	883.756.607.137,85	883.756.607.137,85	(341.956.015.894,42)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.143.740.950,98	0,00	18.040.191.517,23	18.040.191.517,23	(84.103.549.433,75)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.605.329.594,20	0,00	9.872.322.402,00	9.872.322.402,00	2.266.992.807,80
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.616.791.515,80	0,00	3.744.748.269,00	3.744.748.269,00	127.956.753,20
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	1.635.084.859,00	1.635.084.859,00	1.635.084.859,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.921.619.840,98	0,00	2.788.035.987,23	2.788.035.987,23	(88.133.583.853,75)
4.2	DANA PERIMBANGAN	819.025.379.835,00	0,00	808.187.330.373,00	808.187.330.373,00	(10.838.049.462,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	49.724.011.835,00	0,00	44.641.886.953,00	44.641.886.953,00	(5.082.124.882,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	544.038.318.000,00	0,00	537.802.482.000,00	537.802.482.000,00	(6.235.836.000,00)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	225.263.050.000,00	0,00	225.742.961.420,00	225.742.961.420,00	479.911.420,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304.543.502.246,29	0,00	57.529.085.247,62	57.529.085.247,62	(247.014.416.998,67)
4.3.1	Pendapatan Hibah	29.093.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(29.093.200.000,00)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.715.866.020,00	0,00	18.270.448.680,00	18.270.448.680,00	(3.445.417.340,00)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.258.636.567,29	0,00	32.258.636.567,62	32.258.636.567,62	0,33
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.537.321.659,00	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	(7.537.321.659,00)
4.3.6	Pendapatannya Lainnya	206.938.478.000,00	0,00	0,00	0,00	(206.938.478.000,00)
5	BELANJA	1.329.620.925.880,33	0,00	917.044.509.366,00	917.044.509.366,00	(412.576.416.514,33)
5.1	BELANJA TIDAK LANSUNG	743.372.940.167,98	0,00	513.844.033.311,00	513.844.033.311,00	(229.528.906.856,98)
5.1.1	Belanja Pegawai	380.133.079.328,18	0,00	363.365.306.911,00	363.365.306.911,00	(16.767.772.417,18)
5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	80.962.000.000,00	0,00	69.024.600.000,00	69.024.600.000,00	(11.937.400.000,00)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.750.000.000,00	0,00	17.750.000.000,00	17.750.000.000,00	0,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah	210.995.956.600,00	0,00	10.997.908.400,00	10.997.908.400,00	(199.998.048.200,00)
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	43.031.904.239,80	0,00	42.706.218.000,00	42.706.218.000,00	(325.686.239,80)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.500.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(500.000.000,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	586.247.985.712,35	0,00	403.200.476.055,00	403.200.476.055,00	(183.047.509.657,35)
5.2.1	Belanja Pegawai	92.260.758.082,00	0,00	75.585.019.567,00	75.585.019.567,00	(16.675.738.515,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	340.727.391.574,43	0,00	207.682.249.003,00	207.682.249.003,00	(133.045.142.571,43)
5.2.3	Belanja Modal	153.259.836.055,92	0,00	119.933.207.485,00	119.933.207.485,00	(33.326.628.570,92)
	SURPLUS/ DEFISIT	(103.908.302.848,06)	0,00	(33.287.902.228,15)	(33.287.902.228,15)	70.620.400.619,91



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			S/D PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	104.844.002.848,06	0,00	0,00	0,00	(104.844.002.848,06)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.293.547.694,51	0,00	0,00	0,00	(60.293.547.694,51)
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	44.550.455.153,55	0,00	0,00	0,00	(44.550.455.153,55)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	935.700.000,00	0,00	935.700.000,00	935.700.000,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	935.700.000,00	0,00	935.700.000,00	935.700.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	103.908.302.848,06	0,00	(935.700.000,00)	(935.700.000,00)	(104.844.002.848,06)
	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	(34.223.602.228,15)	(34.223.602.228,15)	(34.223.602.228,15)

Sumber Data: BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2020

G. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Apabila isu-isu tidak diantisipasi untuk diselaraskan dan disepadankan maka akan berpotensi gagal dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Jika itu sebuah peluang, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari lingkungan strategis eksternal baik itu isu internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sebagai Kabupaten Kepulauan yang berhadapan langsung dengan Pasifik dan akses laut dan udara cukup terbuka maka pengaruh eksternal sangat besar. Oleh sebab itu dalam menetapkan isu-isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019–2023 telah dipaparkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka teridentifikasi aspek-aspek lingkungan strategis



skala internasional dan nasional dan permasalahan-permasalahan yang berpengaruh langsung dalam pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Maka dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

- 1) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan;

Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Biak Numfor berhubungan dengan masalah pokok antara lain; masih rendahnya akses layanan pendidikan, kualitas penyelenggaraan pendidikan belum optimal, nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat belum terimplementasi dengan optimal, derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan, tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, dan masih tingginya angka kemiskinan.

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudahan akses dan mutu pendidikan sangat diperlukan dalam rangka menaikkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan melanjutkan sekolah (*Expected Years of School*). Pembangunan sumberdaya manusia juga harus diimbangi dengan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah klasik yang masih terjadi yaitu kekurangan guru di hampir semua jenjang pendidikan serta peningkatan kompetensi guru, sehingga perlu perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.

Peningkatan derajat kesehatan akan mempengaruhi usia harapan hidup karena akan mengurangi fluktuatifnya angka kesakitan dan juga angka kematian ibu – bayi – balita.



Penyelesaian permasalahan pendidikan dan kesehatan akan menaikkan IPM yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2020, capaian IPM Kabupaten Biak Numfor mencapai nilai 72,19. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Papua yang sebesar 60,44. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kabupaten Biak Numfor masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM. Selain itu, peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor juga perlu mendapatkan perhatian serius mengingat selama ini RSUD Biak telah melayani pasien rujukan di wilayah saireri, sehingga kualitas pelayanan perlu lebih ditingkatkan.

Meskipun angka pengangguran rendah dan cenderung turun, namun Pemerintah Kabupaten Biak Numfor harus mengatasi permasalahan yaitu perkembangan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Kualitas dan produktifitas tenaga kerja juga menjadi perhatian, mengingat di era global dituntut tenaga kerja yang berdaya saing untuk dapat eksis.

Permasalahan penurunan angka kemiskinan yang muncul adalah bahwa semakin kecil persentase kemiskinan, maka akan semakin sulit melakukan penurunan, karena sudah semakin detail mengarah kepada individu yang spesifik mengalami kondisi miskin. Hal ini menjadi sulit, karena jenis kemiskinan ataupun penyebab kemiskinan ikut bagian sebagai kendala.

Selain itu, Kebijakan Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin juga sering menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan kebijakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik dalam hal pemerataan kesempatan bekerja



ataupun pemerataan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya akan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita penduduk (perlu disesuaikan dengan data karena Indeks Gini dan PDRB menunjukkan tren positif)

2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang harus dipenuhi. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala dalam tata kelola pemerintahan. Permasalahan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya keterbukaan informasi publik, dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab Biak Numfor sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 memperoleh nilai 33,16 atau predikat "C". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan mendasar. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa salah satu kelemahan yang menjadi penyebab rendahnya nilai akuntabilitas Kabupaten Biak Numfor adalah belum optimalnya penyusunan penjabaran cascading kinerja untuk setiap tingkatan jabatan.



Indikator juga belum sepenuhnya memenuhi kaidah SMART, yaitu; *Spesific, Measureable, Attainable, Relevant and Timely*.

Akuntabilitas keuangan ditunjukkan dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil capaian Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Biak Numfor semakin meningkat yaitu dari Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2018 Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2019. Meskipun capaian opini BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah mencapai target RPJMD tahun 2019 namun perlu ditingkatkan untuk mencapai target RPJMD menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sektor pelayanan publik juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan dimana kualitas SDM aparatur sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah masih tergolong rendah dengan tingkat disiplin kerja yang juga masih tergolong rendah. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat terutama dari segi inovasi pelayanan publik yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Disisi lain, permasalahan terkait lahan pemerintah yang belum sepenuhnya terselesaikan menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan, sehingga perlu untuk ditangani dengan lebih serius. Belum tuntasnya penegasan batas wilayah antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan pemerintah Kabupaten Supiori juga menjadi polemik yang perlu mendapatkan perhatian serius.



- 3) Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah;

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor sebagian besar ditopang oleh sektor-sektor ekonomi kreatif, namun belum semua potensi ekonomi kreatif digali dan dikembangkan secara optimal sehingga sektor pariwisata belum dapat dioptimalkan.

Permasalahan belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; pertumbuhan industri rendah, masih rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Biak Numfor, masih rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM, belum optimalnya nilai ekspor Perdagangan, belum optimalnya hasil produksi perikanan di Kabupaten Biak Numfor, serta masih minimnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas seni dari masyarakat.

Kualitas produk menjadi faktor yang harus mendapatkan perhatian di era pasar global. Produk yang tidak berdaya saing akan sulit sekali memasuki pasar regional maupun internasional. Dengan demikian, hanya produk dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang bisa bertahan di pasar global. Pasar global juga menuntut pelaku industri dalam penguasaan akses dan informasi pasar.

Produk perikanan merupakan produk unggulan di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini juga didukung dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua dimana Biak Numfor menjadi target pengembangan kawasan industri perikanan dan pariwisata. Namun demikian produksi perikanan tangkap di Kabupaten Biak Numfor masih kurang optimal karena masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Biak. Di sisi pengolahan



perikanan, masih ditemukan kualitas produk yang kurang berdaya saing dengan skala mikro, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan menjadi industri dengan skala lebih besar yang dapat berdampak positif bagi pendapatan asli daerah.

Dari sektor pariwisata, pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Destinasi wisata bahari yang menjadi unggulan pun belum tertata secara sistem dan terhubung dengan pendukung lainnya, baik infrastruktur, moda angkutan akses ke lokasi wisata, sarana prasana akomodasi dan penginapan serta pemasaran wisata dan kerjasama dengan pihak swasta. Mengingat kondisi geografis pulau biak yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut. Penciptaan *brand identity* sebuah obyek wisata juga belum dilakukan dalam rangka menciptakan *brand image*. Dengan masuknya festival Byak Munara Wampasi dalam kalender tahunan pariwisata nasional diharapkan menjadi daya ungkit bagi perkembangan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor kedepan.

Dari sektor jasa, perlu adanya pengembangan di bidang jasa transportasi dan perdagangan mengingat letak geografis pulau biak yang cukup strategis akan mempengaruhi daerah-daerah sekitar dan sesuai dengan RTRW Nasional 2007-2027 dimana Biak Numfor diarahkan untuk pengembangan pelabuhan nasional dan bandara pusat penyebaran tersier, sehingga menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menentukan arah kebijakan kedepan.

- 4) Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek;

Penting untuk mempercepat proses pembangunan



daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Permasalahan belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, belum optimalnya Infrastruktur jaringan jalan yang dapat melayani warga, belum optimalnya kualitas ruang publik kreatif, belum optimalnya penataan kawasan strategis serta rendahnya kualitas lingkungan hidup.

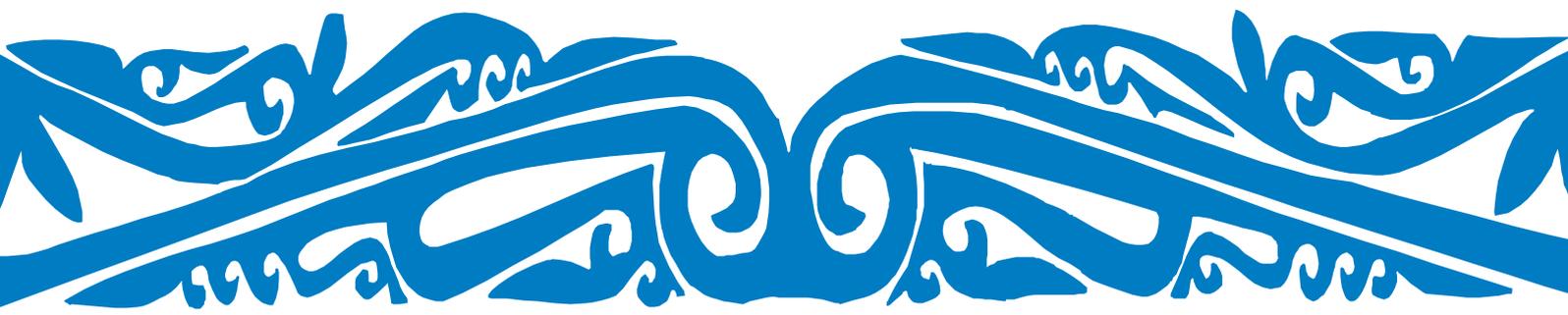
Penanganan kawasan kumuh memerlukan upaya terintegrasi dalam pemenuhan standar kualitas lingkungan permukiman, antara lain; penanganan genangan banjir dan rob, pelayanan sampah, pelayanan air minum, kualitas perumahan penduduk berpenghasilan rendah, dan pelayanan air limbah permukiman. Penanganan sampah permukiman dan penanganan air limbah permukiman masih memerlukan upaya lebih dalam mengurangi kawasan kumuh.

Berkaitan dengan pelayanan air minum, Kabupaten Biak Numfor memiliki ketergantungan air baku dari sumber mata air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani wilayah perkotaan. Sementara pemanfaatan sumur dalam, baik oleh masyarakat umum ataupun swasta seperti hotel ataupun perusahaan dapat menjadi pemicu terjadinya penurunan permukaan tanah.



Dilihat dari penataan dan pemanfaatan ruang untuk memberikan rasa nyaman bagi warga, penyediaan fasilitas publik pada kawasan strategis serta pengawasan pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas lingkungan khususnya penyediaan ruang terbuka hijau akan menaikkan kenyamanan warga Kabupaten Biak Numfor.

Disisi lain, penanganan permasalahan sampah sampai sejauh ini sudah tertangani dengan cukup baik oleh pemerintah daerah, namun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah sehigga diharapkan dengan pengembangan inovasi Bank Sampah yang lebih optimal mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

A. VISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 – 2023

Visi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan visioner yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkannya. Visi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2019-2023. Dengan menyadari keberadaan dan kondisi faktual (isu-isu strategis) seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial ekonomi, budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya, serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, maka disusun rumusan Visi Kabupaten Biak Periode Tahun 2019-2023 yaitu:

**“BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN
BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG
BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN”**



B. MISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 – 2023

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka telah ditetapkan 4 Misi Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima
- 4) Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang.

Misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 - 2023

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan mutu pendidikan
		Meningkatnya budaya baca masyarakat
		Terwujudnya Biak Numfor sebagai kota tujuan belajar wilayah Saireri dan Papua
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat dan akses kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas manajemen rumah sakit dan puskesmas
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat
	Meningkatkan partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya pembinaan pemuda bagi pemuda
		Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja
	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Religiusitas Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya pelayanan sosial dan keagamaan kepada masyarakat
		meningkatnya suasana damai dan kepastian hukum
terwujudnya proteksi terhadap nilai-nilai adat dan budaya asli biak		



Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan
		meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan
		terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada sektor ekonomi kreatif dan UMKM
	Meningkatkan Potensi Kawasan Strategis dalam Memajukan Sektor Perdagangan dan Investasi	Meningkatkan skala usaha jasa perdagangan
		Meningkatnya daya saing dan investasi antar wilayah
		Bertumbuhnya iklim investasi pada sektor-sektor unggulan daerah
	Meningkatkan Keunggulan dan Daya Tarik Promosi Wisata	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat
Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah)		
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang baik, bersih dan disiplin
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan	meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak
Misi 4 Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang	Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang perkembangan wilayah	Peningkatan akseibilitas dalam mendukung pengembangan infrastruktur wilayah
		Implementasi rencana tata ruang wilayah secara konsisten
		Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
		Meningkatnya ketersediaan energi baru terbarukan
		Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah
	Mewujudkan kesadaran pengelolaan lingkungan dalam pembangunan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 - 2023



C. PERENCANAAN KINERJA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019–2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 yang ditanda tangani Bupati Biak Numfor. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 di sajikan pada tabel berikut :

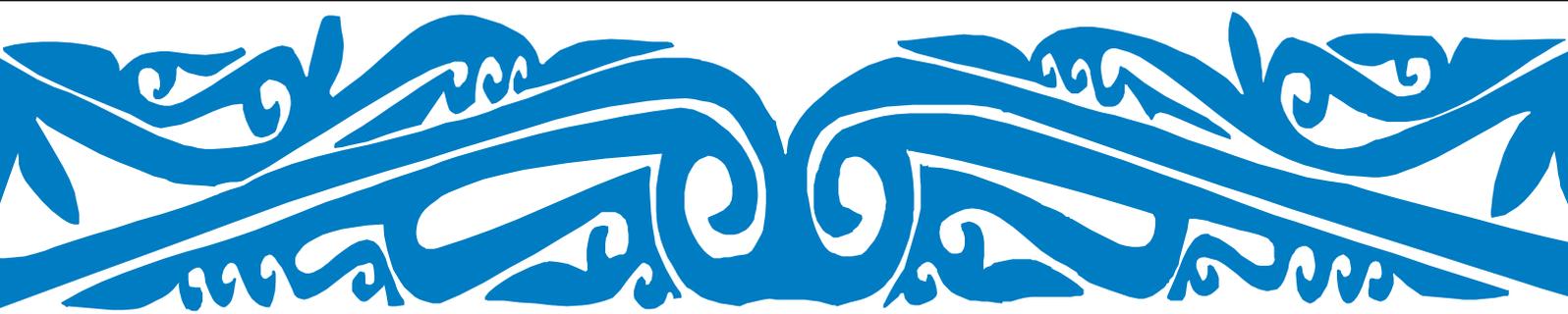
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bupati Biak Numfor Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Predikat AKIP Kabupaten	C
		2. Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	WDP
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	4,678%
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,8 Tahun
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	1. APK PAUD	14,58
		2. APK SD/ MI	96,49
		3. APK SMP/ MTs	88,87
		4. APM SD/ MI	82,17
		5. APM SMP/ MTs	81,06
		6. Rasio Guru Berpendidikan D4/ S1	45
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	67,856 Org
		2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	83,613 Ton
		3. Tingkat Konsumsi Ikan	47,3%
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	471 Org
		2. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	12 Org
7	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	17,60%
		Capaian Jumlah Peserta KB	54,01 %



		Presentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	54,4%
8	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang Dilestarikan	70%
		Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	8 Sanggar





BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana / target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

NO.	NILAI KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1	≥ 95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil



Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN (%)	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	≥ 95
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	2	100%				Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	43,62%	Kurang Berhasil			
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	99,20%				Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	6	177,92%				Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan	3	77,9%		Cukup Berhasil		
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja	2	211,89%				Sangat Berhasil
7	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	3	110,44%				Sangat Berhasil
8	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	2	279,82%				Sangat Berhasil
Jumlah		20					



Hasil pengukuran kinerja sesuai sasaran dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah” dengan 2 (Dua) indikator yaitu Predikat AKIP Kabupaten dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah mencapai 100% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”, data ini merupakan capaian Tahun 2019 sedangkan di Tahun 2020 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai dengan disusunnya laporan ini dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah hasilnya belum ada.

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Predikat AKIP Kabupaten	Predikat	C	C	100%
2	Opini BPK terhadap LKD	Opini	WDP	WDP	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Sumber Data : Sekretariat Daerah dan BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Pencapaian sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Predikat AKIP Kabupaten

Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah disampaikan pada tanggal 24 Februari 2020. Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 adalah 33,16 predikat “C”, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh budaya kinerja dan penyelenggaraan



pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan mendasar.

Hal ini sesuai surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/244/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

Capaian kinerja Predikat AKIP Kabupaten sebesar 100% dihitung dari perbandingan realisasi predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Biak Numfor (Predikat C) dibagi target (Predikat C) dikali seratus persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 predikat AKIP Kabupaten Biak Numfor tidak mengalami peningkatan atau penurunan predikat yaitu tetap Predikat C.



Gambar 3.1

Sekretaris Daerah Kab. Biak Numfor Markus O. Mansnembra, S.H., M.M. ketika menerima Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019

2) Opini BPK atas pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Opini BPK atas pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 adalah Disclaimer. Hasil ini mengalami peningkatan pada Tahun 2019 menjadi WDP. Adapun upaya-upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten Biak Numfor sebagai langkah meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh Opini WDP adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Penguatan Sarana dan Prasarana Penunjang;
3. Perbaikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Penyempurnaan Regulasi;
5. Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Gambar 3.2

Sekretaris Daerah Kab. Biak Numfor Markus O. Mansnembra, S.H.,
M.M. ketika menerima Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1
Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2023
1	Predikat AKIP Kabupaten	Predikat	C	C	BB
2	Opini BPK terhadap LKD	Opini	DISCLAIMER	WDP	WTP

Sumber Data : Sekretariat Daerah dan BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini adalah Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan mendasar.

2. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 43,62% dan termasuk predikat “Kurang Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	4,678	2,041	43,62%

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2020



Realisasi Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2020 adalah sebesar 2,041%, dihitung dari:

$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\% = \frac{18.040.191.517}{883.756.607.137} \times 100\% = 2,041\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai berakhirnya TA. 2020 sebesar Rp. 18.040.191.517,- (Delapan Belas Miliar Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribuh Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri atas realisasi :

- Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 9.872.322.402
- Hasil Retribusi Daerah Rp. 3.744.748.269
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 1.635.084.859
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 2.788.035.987

Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan sampai berakhirnya TA. 2020 sebesar Rp. 808.187.330.373 (Delapan Ratus Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribuh Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas realisasi :

- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 44.641.886.953
- Dana Alokasi Umum Rp. 537.802.482.000
- Dana Alokasi Khusus Rp. 225.742.961.420

Sedangkan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir TA. 2020 sebesar Rp. 57.529.085.247 (Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribuh Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2023
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	1,13	1,658	2,041	10

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi sasaran ini yaitu dilaksanakannya beberapa inovasi sebagai berikut:

- 1) Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)
Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan, air bawah tanah dan reklame beserta retribusi daerah. Aplikasi ini jugalah yang menjadi bagian dari *e-Government* Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan nama e-pendapatan.
- 2) E-PBB
Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).
- 3) E-BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah)
Aplikasi ini khusus untuk mengelola data pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)
- 4) DAHSBOARD
Aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan penerimaan per jenis pajak dalam bentuk data/ angka realtime yang terhubung ke system Bank Papua.
- 5) Host to Host dengan Bank Papua
Aplikasi ini memungkinkan 3 aplikasi perpajakan yang ada di BAPENDA Biak Numfor terhubung dengan webservice



ke aplikasi system penerimaan dan penyetoran di Bank Papua sebagai bank persepsi penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Biak Numfor.

6) Host to Host dengan Badan Pertanahan Nasional

Aplikasi ini menghubungkan dengan webservice aplikasi SISMIOP pada BAPPEDA Biak Numfor dengan system pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, yang terutama membantu dalam mempercepat proses peralihan hak atas tanah.

7) Pemasangan alat perekam transaksi elektronik (POS dan TMS) pada hotel, restoran, dan hiburan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan perolehan pajak hotel, restoran, dan hiburan. Ke depan alat ini juga akan dipasang pada objek pajak lain seperti parkir, penerangan jalan, dan air bawah tanah.

8) Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura Support dalam mengelola perparkiran di Kawasan Pasar Inpres Biak dan Pasar Darfuar Biak. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak parkir yang sebenarnya sangat potensial di Kabupaten Biak Numfor.

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan indikator kinerja “Angka Harapan Hidup” mencapai 99,20% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 3 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.6

Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,8	68,25	99,20%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Realisasi Angka Harapan Hidup di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 yaitu 68,25 tahun dengan capaian 99,20% dari target yang telah ditetapkan yaitu 68,8 tahun.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2023
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68	68,20	68,25	70

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.8

Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2020

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	702.780.000	592.051.200	84,24
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0	0	0
Program obat dan perbekalan kesehatan	19.510.119.300	19.206.467.147	98,44
Program upaya kesehatan masyarakat	25.351.556.000	23.778.926.730	93,80
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	566.488.800	313.838.800	55,40



Program Perbaikan Gizi Masyarakat	382.825.000	382.825.000	100,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	9.311.888.452	5.222.694.000	56,09
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.509.000.000	2.098.870.000	83,65
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	57.558.281.484	43.521.221.572	75,61
Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak	1.185.657.000	1.185.657.000	100,00
Program Sumber Daya Kesehatan	5.960.000.000	5.954.150.000	99,90
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Asli Papua	500.000.000	500.000.000	100,00
Program promosi makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat	319.000.000	248.992.000	78,05
Program penunjang DAK Fisik dan non fisik	407.089.147	206.400.000	50,70
JUMLAH	124.264.685.183	102.620.042.249	70,83

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 102.620.042.249,- dari anggaran sebesar Rp 124.264.685.183,- atau mencapai 70,83%. Realisasi keuangan sebesar 70,83% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,20%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Angka Harapan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya peningkatan kegiatan bidang kesehatan melalui program Upaya kesehatan masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Perbekalan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin, Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Prasarana

Puskesmas Dan Jaringannya, Program Kesehatan Rujukan, Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular.



Gambar 3.3
Pelayanan Posyandu bayi dan balita



Gambar 3.4
Pemeriksaan air bersih di masyarakat



Gambar 3.5
Pelayanan kesehatan puskesmas kelling

2) Kualitas kesehatan masyarakat semakin baik berdasarkan indikator kinerja antara lain:

a) Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi di Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 sebesar 5,05 per seribu kelahiran hidup, meningkat bila dibandingkan dengan AKB tahun 2016 sebesar 13,6 per seribu kelahiran hidup, angka kematian bayi di Kabupaten Biak Numfor sangat rendah bila dibandingkan dengan



Standar Pelayanan Minimal Nasional sebesar 23 kelahiran perseribu kelahiran hidup.

b) Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka kematian balita merupakan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH).

Kematian balita di Kabupaten Biak Numfor (AKABA) di Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 sebesar 0,30 per seribu kelahiran hidup, menurun bila dibandingkan dengan AKABA tahun 2017 sebesar 20,4 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian balita di Kabupaten Biak Numfor telah mencapai standar pelayanan minimal secara nasional sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Rendahnya AKABA di Kabupaten Biak disebabkan karena dilakukan perbaikan disemua jenjang pelayanan kesehatan, sehingga berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.

c) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan) selama masa kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup (KH). Angka Kematian Ibu di Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 sebesar 189,3 per 100.000 kelahiran



hidup, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan AKI tahun sebelumnya sebesar 273 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Biak Numfor masih tergolong tinggi dan belum mencapai target jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup (sesuai dengan target MDGs 2015) sekalipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

d) SDM

Berdasarkan status kepegawaian jumlah sumber daya manusia SDM kesehatan Sebagai Berikut; Pegawai Negeri Sipil sebanyak 501 orang, Pegawai tidak tetap/kontrak sebanyak 133 orang, Pegawai Tidak tetap atau kontrak sebanyak 11 orang, dengan total keseluruhan berjumlah 634 orang.

Berdasarkan Jenjang pendidikannya, sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut; Diploma Tiga (D-3) sebanyak 437 orang (68,93%), Strata Satu (S-1) sebanyak 107 orang (16,88%), Jenjang Strata Dua (S-2) sebanyak 9 orang (1,43%).

e) Akreditasi Puskesmas

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi. Dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan atau kesehatan masyarakat.

Sebanyak 17 puskesmas yang ada di Kabupaten Biak Numfor telah berstatus akreditasi hingga pada Tahun 2020. Puskesmas yang telah terakreditasi sebanyak 10 puskesmas, dengan rincian; Puskesmas Terakreditasi Madya sebanyak 6 Puskesmas dan Terakreditasi Dasar sebanyak 4 Puskesmas.



Gambar 3.6
Evaluasi Pelayanan Puskesmas



Gambar 3.7
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan
Imunisasi



Gambar 3.8
Pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita
serta ibu hamil di Posyandu



4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan” dengan 6 (Enam) indikator kinerja mencapai 177,92% dan termasuk predikat “ Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 4 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
			TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN
1	APK PAUD	Persen	14,58	63,96	438,68
2	APK SD / MI / Paket A	Persen	96,49	123,53	128,02
3	APK SMP / MTS / Paket B	Persen	88,87	94,33	106,14
4	APM SD / MI / Paket A	Persen	82,17	98,63	120,03
5	APM SMP / MTS / Paket B	Persen	81,06	89,35	110,22
6	Rasio Guru Berpendidikan D4/S1	Persen	45	74	164,44
Rata-Rata Capaian					177,92

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) APK PAUD

Bahwa anak usia 0-6 tahun sebesar 63,96% telah banyak yang bersekolah di jenjang Pendidikan Anak usia Dini, baik itu di Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak maupun Satuan Pendidikan Sejenis, artinya telah banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada anak sedari dini.

2) APK SD / MI / Paket A

Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SD, MI dan Paket A di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan Tahun



2020 adalah sebesar 123,53% artinya dari 17.605 orang anak usia 7-12 tahun, telah seluruhnya bersekolah tingkat SD, MI dan Paket A. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 95.82% mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 27,71%.

3) APK SMP / MTS / Paket B

Angka Partisipasi Kasar (APK) Siswa SMP, MTs dan Paket B di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar 94,33% artinya dari 10.277 orang anak usia 13 - 15 tahun, baru 9.694 orang anak yang sekolah tingkat SMP, MTs dan Paket B. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 86,87% mengalami peningkatan sebesar 7,46%.

4) APM SD / MI / Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) Siswa SD, MI dan Paket A di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar 98,63% artinya dari 17,605 orang anak usia 7 – 12 Tahun, sebanyak 17,364 orang anak telah berada dalam jenjang pendidikan yang semestinya yaitu bersekolah di tingkat SD, MI dan Paket A. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 75,29% mengalami penurunan sebesar 3,23%.

5) APM SMP / MTS / Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) Siswa SMP, MTs dan Paket B di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar 89,35% artinya dari 10,277 orang anak usia 13 - 15 Tahun, baru 9.183 orang anak yang sekolah di tingkat SMP, MTs dan Paket B. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 81,25% mengalami kenaikan sebesar 8,10%.



Berkaitan dengan program wajib belajar 9 Tahun, kondisi ini sangat memuaskan, dengan tingkat keidealan semua penduduk usia 13 – 15 tahun harus bersekolah dan menyelesaikan jenjang minimal pendidikan menengah (SMP/ MT's/ Paket B). Artinya Pemerintah Daerah telah memberikan perhatian terhadap keadaan ini untuk terus ditingkatkan di masa datang.

Sekalipun angka 9.183 orang siswa dalam 10.277 penduduk usia 13 – 15 tersebut tidak dapat dijadikan patokan terhadap Angka Melanjutkan (AM) dari jenjang SD ke SMP, sebab dimungkinkan pula terjadi bahwa 1.094 penduduk yang lain berpindah domisili ke lain daerah (pindah sekolah keluar Biak).

6) Rasio Guru Berpendidikan D4/S1.

Untuk peningkatan mutu pendidikan dilakukan pula tugas belajar bagi guru – guru untuk program S1, S2 dan S3 dan guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D – IV dapat dihitung dari jumlah guru di Kabupaten Biak Numfor yang berijazah S1 dan D-IV sebanyak 475 dari 714 jumlah guru jenjang SD / MI dan 335 dari 386 jumlah guru jenjang SMP / MTs. Berdasarkan angka tersebut diketahui bahwa persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D – IV sebesar 74%. Realisasi tersebut meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 45%.

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Kebudayaan serta Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan, namun



demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu : Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan kesetaraan.

Realisasi pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 masih merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013, dengan 14 indikator pelayanan pendidikan dasar oleh Kabupaten/ Kota, dan 13 indikator pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan. Sementara untuk tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan dengan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

- Indikator 1

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/ MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. Berdasarkan hasil isian SPM, terdapat 165 SD dalam jarak < 3 KM dan 53 SMP dalam jarak < 3 KM, sehingga memenuhi capaian 100%.

- Indikator 2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/ MI tidak melebihi 32 siswa, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 siswa. Untuk setiap rombongan belajar



tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. Berdasarkan hasil isian SPM, terdapat 107 SD dan 36 SMP yang memenuhi sehingga capaian SD sebesar 65% dan SMP sebesar 67%.

- Indikator 3

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Berdasarkan hasil isian SPM, terdapat 2 SMP yang memenuhi sehingga capaian SMP sebesar 4%.

- Indikator 4

Di setiap SD/MI dan SMP/ MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 11 SD dan 15 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 6% dan SMP sebesar 28%.

- Indikator 5

Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 147 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 89%.

- Indikator 6

Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.



Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 1 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 2%.

- Indikator 7

Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 120 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 79%.

- Indikator 8

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 46 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 87%.

- Indikator 9

Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 3 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 6%.

- Indikator 10

Di setiap Kabupaten/ Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 31 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 18%.



- Indikator 11

Di setiap Kabupaten/ Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 27 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 50%.

- Indikator 12

Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 60% Pengawas SD & SMP yang memenuhi capaian SPM.

- Indikator 13

Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 167 SD dan 53 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD dan SMP sebesar 100%.

- Indikator 14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 4 SD/ kunjungan dan 7 SMP/kunjungan yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 2% dan SMP sebesar 13%.

- Indikator 15

Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.



Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 71 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 42%.

- Indikator 16

Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 22 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 42%.

- Indikator 17

Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 69 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 41%.

- Indikator 18

Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 18 SD dan 5 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 10% SMP sebesar 9%.

- Indikator 19

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 15 SD dan 7 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 8% dan SMP sebesar 13%.



- Indikator 20

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu, Kelas 3 : 24 Jam per minggu, Kelas 4-6 : 27 Jam per minggu, Kelas 7-9 : 27 Jam per minggu. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 96 SD dan 43 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 57% dan SMP sebesar 81 %.

- Indikator 21

Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 166 SD dan 53 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 99% dan SMP sebesar 100%.

- Indikator 22

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 146 SD dan 48 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 87% dan SMP sebesar 91%

- Indikator 23

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 154 SD dan 50 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 92% dan SMP sebesar 94%.

- Indikator 24

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 139 SD



dan 44 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 83% dan SMP sebesar 83%.

- Indikator 25

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 149 SD dan 50 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 89% dan SMP sebesar 94%.

- Indikator 26

Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/ UN). Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 97 SD dan 21 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 58% dan SMP sebesar 41%.

- Indikator 27

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 159 SD dan 51 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 95% dan SMP sebesar 95%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2023
1	APK PAUD	Persen	8,80	11,69	63,96	23,24
2	APK SD / MI / Paket A	Persen	95,15	95,82	123,53	98,5
3	APK SMP / MTS / Paket B	Persen	84,87	86,07	94,33	94,87
4	APM SD / MI / Paket A	Persen	75,29	78,73	98,63	92,5
5	APM SMP / MTS / Paket B	Persen	81,44	81,25	89,35	80,5
6	Rasio Guru Berpendidikan D4/S1	Persen	42,44	43	74	53

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2020



Gambar 3.9
Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd. ketika bertemu para anak TK Ade Irma dan Pelajar SD di Kampung Wirmaker dalam Program Peningkatan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019



Gambar 3.10
Kegiatan Pelatihan Kreativitas Pengajaran Guru SD di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020



Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.11
Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2020

Uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan	Anggaran setelah perubahan Jumlah	Realisasi Jumlah	Presentase (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	882.000.000	872.009.900	98,86
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.505.000.000	1.505.000.000	100
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	27.451.312.000	18.085.053.982	65,88
Program Pendidikan Non Formal	1.078.800.000	1.078.800.000	100
Program pendidikan tinggi	2.500.000.000	1.288.600.000	51,54
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	8.920.200.000	8.920.200.000	100
Program Penunjang DAK Fisik dan Non Fisik	963.115.000	963.115.000	100
JUMLAH	43.300.427.000	32.712.778.882	88,04

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 32.712.778.882,- dari anggaran sebesar Rp 43.300.427.000,- atau 88,04%. Realisasi keuangan sebesar 88,04% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 177,92%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan baik penambahan ruang kelas



maupun sarana prasarana pendidikan lainnya yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor secara bersinambungan, selain itu akreditasi sekolah juga memberikan pengaruh terhadap pencapaian keberhasilan sasaran ini. Berikut data Sekolah Terakreditasi di kabupaten Biak Numfor:

Tabel 3.12
Data Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Terakreditasi.

NO.	NAMA SEKOLAH	NPSN	AKREDITASI	
			PERINGKAT	TAHUN
SD				
1	SDS PLUS PUTRA PERMATA	60303979	A	2016
2	SDS YAPIS 2	60300462	A	2016
3	SDS YPK WAUPNOR	60300282	A	2014
4	SDS YPPK SANTOYOSEP 2	60300298	A	2016
5	SD INPRES ANGKASA	60300407	B	2014
6	SD INPRES BRUYADORI	60300405	B	2019
7	SD INPRES DERNAFI BIAK UTARA	60300403	B	2019
8	SD INPRES FANDOI BIAK KOTA	60300402	B	2016
9	SD INPRES KARANG MULIA	60300422	B	2016
10	SD INPRES MANDALA	60300418	B	2016
11	SD INPRES MANDOUW	60300417	B	2016
12	SD INPRES PARAY	60300386	B	2016
13	SD INPRES SORIDO BIAK KOTA	60300388	B	2019
14	SD INPRES SUNYAR	60300395	B	2019
15	SD NEGERI 2 RIDGE 1 BIAK	60300294	B	2016
16	SD NEGERI MARDORI BIAK BARAT	60300299	B	2014
17	SD YPK BOSNIK	60300466	B	2019
18	SD YPK OPURI	60300425	B	2019
19	SD YPK SANDAUW	60300302	B	2019
20	SD YPK YOBDI BIAK UTARA	60300287	B	2019
21	SDS YPK 1 RUMAINUM BORUKUB	60300450	B	2016
22	SDS YPK ARYOM	60300470	B	2016
23	SDS YPK DWAR	60300465	B	2016
24	SDS YPK URFU	60300316	B	2016
25	SDS YPK WADIBU	60300314	B	2016
26	SDS YPK WAROI	60300408	B	2012
27	SD INPRES AMPARU	60302943	C	2016
28	SD INPRES ARMNU	60300401	C	2016
29	SD INPRES KABABUR BIAK BARAT	60300412	C	2016
30	SD INPRES KANSAI	60300419	C	2019
31	SD INPRES MAKMAKERBO	60302945	C	2019
32	SD INPRES MANERU BIAK UTARA	60300413	C	2016
33	SD INPRES MOIBAKEN	60300454	C	2019
34	SD INPRES NUSI BABARUK	60300399	C	2019



35	SD INPRES PADWA SUP	60300385	C	2019
36	SD INPRES RARMPIMBO	60300382	C	2019
37	SD INPRES SAMBERPASI	60300383	C	2019
38	SD INPRES SAMBERSUB	60300381	C	2019
39	SD INPRES SAMOFA	60300377	C	2016
40	SD INPRES SAWA	60302947	C	2019
41	SD INPRES SAWAI	60300387	C	2019
42	SD INPRES SERBIN	60300398	C	2019
43	SD INPRES SOSMAI	60300396	C	2016
44	SD INPRES SUNDEY	60302946	C	2019
45	SD INPRES WOUNA RARAWAENA	60300389	C	2016
46	SD INPRES YADIBUR	60300291	C	2019
47	SD NEGERI AWAI	60300290	C	2019
48	SD NEGERI DEDIFU	60300374	C	2019
49	SD NEGERI NAPDORI BIAK BARAT	60300361	C	2012
50	SD NEGERI NERMNU BIAK UTARA	60300460	C	2019
51	SD NEGERI ROIDIFU BIAK UTARA	60300359	C	2016
52	SD NEGERI SAMARES	60300359	C	2019
53	SD NEGERI SARIBI	60300358	C	2019
54	SD NEGERI SAUKOBYE	60302949	C	2012
55	SD NEGERI SESUR BIAK UTARA	60300459	C	2016
56	SD NEGERI SOPEN	60300357	C	2016
57	SD NEGERI SUNERI	60300289	C	2016
58	SD NEGERI YAWIR	60300455	C	2019
59	SD NEGERI ADIBAI	60300464	C	2019
60	SD YPK AMBROBEN	60300473	C	2019
61	SD YPK BARUKI	60300469	C	2019
62	SD YPK ELIM OWI	60300323	C	2019
63	SD YPK KAMERI NUMFOR BARAT	60300429	C	2019
64	SD YPK KARNINDI	60300428	C	2019
65	SD YPK KOREM	60300427	C	2019
66	SD YPK MANDORI	60300436	C	2019
67	SD YPK MANGGARI	60300437	C	2019
68	SD YPK MANWOR	60300448	C	2019
69	SD YPK MBROMSI	60300446	C	2019
70	SD YPK MENUPISEN	60300443	C	2019
71	SD YPK MEOSMANGGUANDI	60300445	C	2019
72	SD YPK MNURWAR	60300442	C	2019
73	SD YPK NAMBER	60300440	C	2019
74	SD YPK NUSI	60300439	C	2019
75	SD YPK PAI	60300310	C	2019
76	SD YPK PAKREKI	60300309	C	2019
77	SD YPK PASI	60300308	C	2019
78	SD YPK SABA	60300305	C	2019
79	SD YPK SARIBRA	60300301	C	2019
80	SD YPK SASARI	60300311	C	2019
81	SD YPK SOOR	60300320	C	2016
82	SD YPK WANSRA	60300313	C	2019
83	SD YPK WARIDO	60300285	C	2019
84	SD YPK WUNDI	60300280	C	2019
85	SD YPK YENBEBA	60300278	C	2019
86	SD YPK YENBURWO	60300277	C	2019
87	SDS YPK BOSNABRAIDI BIAK UTARA	60300467	C	2012
88	SDS YPK IBDI	60300449	C	2016



89	SDS YPK MARYENDI	60300447	C	2012
90	SDS YPK OPIAREF	60300438	C	2016
91	SDS YPK SAMBER	60300303	C	2016
92	SDS YPK YAFDAS	60300279	C	2014
93	SDS YPK YENDIDORI	60300276	C	2016

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	AKREDITASI PERINGKAT	TAHUN
SMP				
1.	SMP NEGERI 1 BIAK BARAT	60300332	A	2016
2.	SMP NEGERI 2 BIAK KOTA	60300349	A	2016
3.	SMP YPK RUTH YENURES	60300336	A	2016
4.	SMP YPK SOOR	60300335	A	2016
5.	SMPS SUB BYAKI FYADI	69757463	A	2016
6.	SMP NEGERI 1 BIAK UTARA	60300329	B	2016
7.	SMP NEGERI 1 BIAK TIMUR	60300330	B	2016
8.	SMP NEGERI 1 BIAK KOTA	60300331	B	2016
9..	SMP YPPK BIAK	60300334		2014
10.	SMP NEGERI 3 BIAK TIMUR	60300340	B	2016
11.	SMP NEGERI 3 BIAK BARAT	60300342	B	2016
12.	SMP NEGERI 2 BIAK UTARA	60300347	B	2016
13.	SMP NEGERI 2 BIAK TIMUR	60300348	B	2016
14.	SMP YAPIS BIAK	60300351	B	2016
15.	SMP NEGERI 1 WARSA	60301707	B	2016
16.	SMP NEGERI 5 BIAK KOTA	60301714	B	2016
17.	SMP NEGERI 6 BIAK KOTA	60301715	B	2016
18.	SMP YPK IMANUEL AGUNG SAMOFA	60301716	B	2016
19.	SD NEGERI YENMANU NUMFOR TIMUR	60302951	B	2016
20.	MTSS DDI BABUSSALAM	60305300	B	2016
21.	SMP NEGERI 3 BIAK KOTA	60300341	C	2016
22.	SMP NEGERI 2 YENDIDORI	60300343	C	2016
23.	SMP NEGERI 2 WARSA	6033344	C	2016
24.	SMP NEGER 4 BIAK BARAT	60301712	C	2016

- 2) Dalam meningkatkan kualifikasi guru dilakukan kemitraan aktif dengan Universitas Terbuka (UT) Jayapura yang membuka program Kelas Jauh di Biak. Selain itu di Kabupaten Biak Numfor telah terdapat beberapa pula beberapa perguruan tinggi seperti ATB, AKPARIS, AKPERIK, AKPER, STIE Koreri, STIH, STKIP, D3 dan S1 Keperawatan dan IISIP Yapis Biak serta program Pascasarjana Magister Administrasi yang juga menjadi penunjang keberhasilan bidang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.



5. Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan” dengan 3 (Tiga) indikator kinerja mencapai 77,9% dan termasuk predikat “Cukup Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 5 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13 Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	67,856	21,783	32,10
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	83,613	84,252	100,76
3	Tingkat Konsumsi Ikan	Persen	47,3	47,7	100,84
Rata-Rata Capaian					77,9

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan merupakan indikator pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata. Adapun jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2020 sebanyak 21.783 wisatawan yang terdiri dari 21.755 wisatawan nusantara dan 28 wisatawan mancanegara. Data ini diambil berdasarkan LKU (Laporan Kegiatan Usaha) dari hotel-hotel. Realisasi ini masih rendah dari yang ditargetkan yaitu 67,856 wisatawan atau capaian jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020 ini hanya mencapai 32,10%. Jika jumlah wisatawan Tahun 2020 sebesar 21.783 dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada Tahun 2019 sebesar 64.417 maka terjadi penurunan jumlah wisatawan sebesar 33,81%.



Gambar 3.11 Kegiatan Festival Biak Munara Wampasi (FBMW) Tahun 2019

2) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap Kabupaten Biak Numfor merupakan indikator pencapaian target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 84.252 ton dari target 83.613 dengan capaian 100,76% sedangkan di tahun 2019 jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 84.188 dari target 83.150 dengan capaian 101,24%. Capaian realisasi pada tahun 2020 hanya mencapai 100,76%. dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 101,24% maka terjadi penurunan sebesar 0,48%.



Gambar 3.12 Hasil Perikanan Tangkapnya Tahun 2020



3) Tingkat Konsumsi Ikan

Capaian kinerja untuk indikator tingkat konsumsi ikan penduduk Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2020 terjadi peningkatan yaitu mencapai 47,7 dari target yaitu 47,3 dengan capaian 100,84%. Realisasi ini jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan tahun 2019 yaitu sebesar 46,5 maka terjadi peningkatan sebesar 102,58%.



Gambar 3.13
Aktifitas jual beli ikan pada pasar ikan biak

Jumlah sarana prasarana tangkap dan effort yang dilakukan oleh para nelayan dalam melaut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.14
Data Sarana Prasarana Tangkap per Distrik

NO.	Distrik	Perahu Motor (Unit)	Perahu Tanpa Motor (Unit)	Pancing	Gillnet	Alat Tangkap lainnya
1	Numfor Barat	140	372	169	398	200
2	Orkeri	32	192	145	227	140
3	Numfor Timur	138	358	168	206	300
4	Bruyadori	17	62	57	82	50
5	Poiru	25	94	52	72	70
6	Padaido	259	634	345	695	500
7	Aimando Padaido	72	160	222	200	125
8	Biak Timur	222	1117	261	648	400
9	Oridek	38	91	124	423	220
10	Biak Kota	440	1144	517	191	900
11	Samofa	22	6	82	38	4
12	Yendidori	71	353	114	423	220
13	Biak Utara	59	191	95	113	25
14	Andey	21	32	35	43	10



15	Warsa	62	159	130	145	70
16	`Yawosi	20	25	67	40	4
17	Bondifuar	33	21	40	51	9
18	Biak Barat	113	393	165	270	200
19	Swandiwe	37	24	98	82	19

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2023
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	64.417	21.783	80.785
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	83.613	84.252	85
3	Tingkat Konsumsi Ikan	Persen	46,5	47,7	50

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3. 16
Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2020

- Dinas Pariwisata

Uraian urusan, organisasi ,program dan kegiatan	Anggaran setelah perubahan Jumlah	Realisasi Jumlah	Presentase (%)
Program pelayanan administrasi perkantoran	878.298.200	739.591.650	84,21
Proram peningkatan sarana dan prasaran	86.970.000	86.970.000	100
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.500	0	0
Program pengembangan pemasaran pariwisata	113.667.100	113.667.100	100



Program pengembangan destinasi pariwisata	11.132.711.750	7.284.988.200	65,43
Program pengembangan kemitraan	250.000.000	191.000.000	76,40
Program penunjang kegiatan DAK fisik dan non fisik	215.420.000	215.120.000	99,86
JUMLAH	12.697.067.550	8.631.336.950	75,12

Sumber Data: BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 8.631.336.950,- dari anggaran sebesar Rp12.697.067.550,- atau 75,12%.

- Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan	Anggaran setelah perubahan Jumlah	Realisasi Jumlah	Presentase (%)
Program pelayanan administrasi perkantoran	533.550.000	528.031.228	98,96
Proram peningkatan sarana dan prasaran apatur	4.500.000	4.500.000	100
Proram peningkatan sarana dan prasaran apatur	44.000.000	0	0
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000	15.000.000	100
Program pengembangan perikanan tangkap	9.397.084.321	9.208.737.987	97,99
Program pengembangan kemitraan	250.000.000	191.000.000	76,40
Program penunjang kegiatan DAK fisik dan non fisik	215.420.000	215.120.000	99,86
JUMLAH	10.459.554.321	10.162.389.215	81,88

Sumber Data: BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2020



Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 10.162.389.215,- dari anggaran sebesar Rp 10.459.554.321,- atau 81,88%. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mencermati pencapaian kinerja Dinas Pariwisata tahun 2020 yaitu hanya 32% dari target yang sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target salah satunya adalah faktor external, adapun faktor tersebut adalah pandemi covid 19. Selain itu faktor yang lain adalah adanya kebijakan pemerintah terhadap pergeseran anggaran. Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor juga mengalami pergeseran anggaran sehingga alokasi dana dalam perencanaan untuk belanja kegiatan dialihkan untuk penanganan covid 19. Berikut adalah kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan adanya pandemi covid 19 antara lain :
 - Kegiatan Festival Biak Munara Wampasi (FBMW) yang seharusnya diselenggarakan tiap tahun pada tanggal 1-7 Juli, karena adanya pandemi covid 19 maka kegiatan ini tidak dilaksanakan. Kegiatan FBMW merupakan kegiatan dalam rangka mempromosikan Kabupaten Biak Numfor akan destinasi wisata, kuliner dan budaya. Diharapkan kegiatan ini mampu menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Biak Numfor.
 - Kegiatan Deep Extreme Indonesia juga merupakan kegiatan yang menjadi media promosi Dinas



Pariwisata Kabupaten Biak Numfor setiap tahunnya, khususnya promosi wisata bahari yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Output kegiatan ini juga akan meningkatkan kunjungan ke Kabupaten Biak Numfor terutama bagi para divers. Dengan tidak diselenggarakannya kegiatan ini juga merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan Dinas Pariwisata dalam pencapaian target sasaran strategis pada tahun 2020.

- Festival Budaya tahun 2020 juga salah satu kegiatan promosi pariwisata pada tahun 2020 namun kegiatan festival budaya ini juga tidak diselenggarakan dikarenakan kegiatan festival budaya akan mendatangkan masa dan berkerumunnya banyak orang. Sehingga ini akan melanggar aturan pemerintah tentang protoko kesehatan. Padahal kegiatan festival ini akan menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung di Kabupaten Biak Numfor.
- Kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata Orang Asli Papua juga salah satu kegiatan yang tidak diselenggarakan pada tahun 2020 meskipun sudah diprogramkan. Kegiatan ini direncanakan akan mengirim para pengelola obyek wisata ke Kampung Kediri untuk belajar Bahasa Inggris dalam rangka penguatan kapasitas mereka dalam pelayan tamu asing. Namun karena adanya pandemi maka kegiatan tersebut ditiadakan mengingat sangat beresiko untuk penularan covid 19. Kegiatan ini juga merupakan salah satu faktor dalam peningkatan kunjungan wisatawan karena pelayan tamu juga sangat penting.



- 2) Jumlah produksi perikanan tahun 2020 meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100,76% tetapi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 101,24% maka terjadi penurunan. Hal ini disebabkan terkendala dalam akses keluar masuk ke daerah-daerah yang mengeluarkan kebijakan pembatasan dan penutupan akses ke wilayahnya masing-masing sehingga terputusnya *supply chain* usaha perikanan pada masa *pandemi covid 19*. Biasanya banyak permintaan ikan ke luar daerah seperti Jayapura, Timika, Wamena bahkan Jawa, tetapi dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan daerah-daerah, sehingga mempengaruhi produksi ikan oleh nelayan.
- 3) Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2020 dimana terjadi *pandemi covid 19*, banyak sosialisasi dari media massa menganjurkan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan salah satunya dengan mengkonsumsi ikan agar bisa menambah daya tahan tubuh. Ikan merupakan bahan makanan yang lengkap mengandung protein, mineral, asam lemak esensial dan vitamin serta omega 3,6 dan 9 sebagai fungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Presiden Joko Widodo juga meminta kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan dan memerintahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar membagi ikan kepada masyarakat. Di kabupaten Biak Numfor, Bupati memberikan instruksi kepada Kepala Dinas Perikanan untuk membagikan ikan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu pada saat *pandemi Covid 19*. Hal ini mempengaruhi meningkatnya konsumsi ikan di tahun 2020.



6. Meningkatnya Kesempatan Kerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja” dengan 2 (Dua) indikator kinerja mencapai 211,89% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 6 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.17
Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	Orang	471	112	23,78%
2	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	Orang	12	48	400%
Rata-rata Capaian					211,89%

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Pencapaian sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah lulusan LLK-UKM tenaga kerja terampil siap pakai merupakan indikator pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja. Adapun jumlah lulusan LLK-UKM tenaga kerja terampil siap pakai sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 112 Orang dari target 471 Orang atau mencapai 23,78%.
2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Target 12 Orang Terealisasi 48 Orang atau mencapai 400%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.18
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2023
1	Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	Orang	1.032	2.806
2	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	Orang	48	84

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.19
Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2020

Uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan	Anggaran setelah perubahan Jumlah	Realisasi Jumlah	Presentase (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	315.000.000	230.338.200	82,82
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	0	0
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	80.000.000	80.000.000	100
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	40.000.000	40.000.000	100
JUMLAH	455.000.000	350.338.200	70,70

Sumber Data: BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 350.338.200,- dari anggaran sebesar Rp 455.000.000,- atau capaian 70,70%. Realisasi keuangan sebesar 70,70% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 211,89%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 2020 jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sudah siap pakai hanya mencapai 23,78% disebabkan banyak kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada UPTD LLK-UKM dikurangi akibat adanya wabah pandemi covid 19.
- 2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat melebihi dari target yaitu sebesar 400% dikarenakan minat dari masyarakat sangat besar.



Gambar 3.14 Kegiatan Pelatihan LLK-UKM Tahun 2020

7. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak” dengan 3 (Tiga) indikator kinerja mencapai 110,44 % dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 7 di sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.20

Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persen	17,60	28	159
2	Capaian jumlah peserta KB	Persen	54,01	52	96,27
3	Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	54,4	41,37	76,05
Rata-Rata Capaian					110,44%

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor berjumlah 25 Orang dengan 7 Orang diantaranya adalah perempuan. Realisasi Presentasi Keterlibatan Perempuan di Parlemen pada Tahun 2020 adalah 28% dihitung dari :

$$\frac{\text{Jumlah Anggota DPRD Perempuan}}{\text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100\% = \frac{7}{25} \times 100\% = 28\%$$

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 16,80% maka capaian indikator ini mencapai 159%.



Gambar 3.15 Keterlibatan Perempuan di Parlemen



2) Capaian Jumlah Peserta KB

Capaian Peserta KB aktif sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar 13.750, akseptor atau 52% Usia Subur atau sebanyak 26.475 Pasangan Usia Subur (PUS)



Gambar 3.16 Kegiatan Pemasangan KB

Pencapaian peserta KB aktif disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21

Jumlah Peserta KB Aktif per Kecamatan Se Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020

No	Kecamatan	PUS	Kontrasepsi							JMLH	Pencapaian Terhadap PUS
			IUD	MOW	MOP	IMP	STK	PIL	KBM		
1	Biak Kota	8.304	205	306	138	875	1.389	1.305	520	4.738	57%
2	Biak Utara	1.443	4	37	12	217	232	151	50	705	49%
3	Biak Timur	1.554	5	29	18	271	213	168	59	763	49%
4	Numfor Barat	460	2	3	0	45	78	56	34	218	47%
5	Numfor Timur	349	2	4	0	57	50	39	15	167	48%
6	Biak Barat	1.057	2	3	0	117	158	138	63	481	46%
7	Warsa	937	2	8	5	113	160	99	55	442	47%
8	Padaido	470	1	5	2	37	76	51	31	203	43%
9	Yendidori	1.458	12	26	6	313	167	120	62	706	48%
10	Samofa	5.905	225	270	142	476	1.171	838	99	3.221	55%
11	Yawosi	428	1	3	3	50	76	47	29	209	49%
12	Andei	491	0	5	4	65	69	65	35	243	49%



13	Swandiwe	719	1	3	3	85	99	78	36	305	42%
14	Bruyadori	400	0	2	0	30	60	47	35	174	44%
15	Orkeri	356	1	2	0	39	63	40	22	167	47%
16	Poiru	394	1	2	0	57	62	41	24	187	47%
17	Aimando	532	1	7	0	45	72	52	45	222	42%
18	Oridek	1.023	1	11	8	153	163	119	49	504	49%
19	Bondifuar	195	0	2	0	24	32	26	11	95	49%
Jumlah		26.475	466	728	341	3.068	4.390	3.480	1.276	13.750	52%

Sumber Data :Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Biak NumforTahun 2020

3) Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Biak Numfor selama tahun 2020 berjumlah 29 korban dan yang mendapat pendampingan dan penyelesaian kasus kekerasan tersebut berjumlah 12 korban, sehingga realisasi Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Terhadap Perempuan dan Anak adalah 41,37% dihitung dari :

$$\frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak}} \times 100\% = \frac{12}{29} \times 100\% = 41,37\%$$

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 39,2% maka capaian indikator ini mencapai 97%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.22
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2023
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persen	16,00	28,00	28,00	20,00
2	Capaian jumlah peserta KB	Persen	53%	53%	52%	55,47
3	Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	24	37,93%	41,37%	100,00

Sumber Data :Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Biak NumforTahun 2020

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.23
Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2020

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan Jumlah	Realisasi Jumlah	Persentase%
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	412.500.000	285.866.211	69,30
Program Keluarga Berencana	7.456.862.000	7.399.039.926	99,22
JUMLAH	7.869.362.000	7.684.906.137	84,26

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2020

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 7.684.906.137,- dari anggaran sebesar Rp 7.869.362.000,- atau dengan capaian 84,26%. Realisasi keuangan sebesar 84,26% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 110,44%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor akan pentingnya memiliki keterwakilan perempuan di Lembaga pemerintah yang akan mewakili aspirasi kaum perempuan di Kabupaten Biak Numfor;
- 2) Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan perlindungan kepada Perempuan dan Anak;
- 3) Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menjaga dan melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak.

8. Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya” dengan 2 (Dua) indikator kinerja mencapai 279,82% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 8 di sajikan dalam tabel berikut ini

Data capaian kinerja sasaran 8 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.24
Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan	Persen	70	33	47,14
2	Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	Sanggar	8	41	512,5
Rata-Rata Capaian					279,82

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2020



Pencapaian indikator kinerja tahun 2020 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Persentase Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs, Kawasan di Kabupaten Biak Numfor berjumlah 39 dan yang dilestarikan di Kabupaten Biak Numfor berjumlah 33, artinya realisasi indikator kinerja Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan terealisasi 47,14%.
- 2) Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif
Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak Numfor sampai tahun 2020 adalah sebesar 41 dari target 8 sanggar seni budaya atau mencapai 512,5% dimana keseluruhan Sanggar Seni tersebut masih aktif.

Tabel 3.25
Data Kelompok Sanggar Seni atau Sram di Kabupaten Biak Numfor

No.	Nama Sanggar	Ketua	Jenis Bidang Seni	Alamat	Ket.
Distrik Biak Kota					
1.	ASKI	Gustaf Rumaropen	Musik, Tari, Ukir dan Cenderamata	Yenures	Aktif
2.	SOREN ARWAY		Musik dan Tari	Burokub	Aktif
3.	IRIAMA	Wempi Kabarek	Musik dan Tari	Saramom	Aktif
4.	Bunga Saron	Yulianus Mandosir	Musik dan Tari	Saramom	Aktif
5.	Dore Insiki	Yohan Msen	Musik dan Tari	Sorido	Aktif
6.	Mangganggan	Nataniel Sroyer	Musik dan Tari	Inggiri	Aktif
7.	Kanggandi	Arcilaus Mirino	Ukir	Inggiri	Aktif
8.	Sarisa Iriani	Dolfinus Sanadi	Musik dan Tari	Insrom	Aktif
9.	Karesun Byak	Yohan Msen	Ukir dan Cenderamata	Insrom	Aktif
10.	Soru Kamasan	Maurids Dimara	Musik, Tari dan Ukir	Insrom	Aktif
11.	Manyouri	Hairil Jumaing	Musik dan Tari	Manswam	Aktif
12.	Sanumi	Isak Simbiak	Ukir	Sanumi	Aktif
13.	Mansikondo	Otto Simopiaref	Ukir	Sanumi	Aktif
14.	Mankubui	Denis Wakum	Ukir Dan Kria	Mokmer	Aktif
15.	Abuf	Mattheuss Awak	Ukir dan Cenderamata	Paray	Aktif
16.	Rwaren Bekra	Marice Yawan	Musik dan Tari	Anggraidi	Aktif
17.	Mayowa	Yusup Ronsumbre	Musik, Tari dan Kria	Kababur	Aktif
Distrik Samofa					
18.	Manbefor	Price Womsiwor	Musik dan Tari	Brambaken	Aktif
19.	Warpar	Edison Randongkir	Ukir	Yafdas	Aktif
Distrik Biak Timur					
20.	Camar	Herman Bubre	Musik dan Tari	Ruar	Aktif
21.	Apaimanam	Markus Kurni	Ukir dan Kria	Bindusi	Aktif
22.	Byak Kamar	Ismael Manggara	Ukir	Kajasi	Aktif



Distrik Oridek					
23.	Mareni	Bodowen Rumbino	Musik, Tari dan Ukir	Opiaref	Aktif
Distrik Yendidori					
24.	Beyuser	Buce Rumbrawer	Ukir	Samber	Aktif
25.	Manwarkion	Daniel Aibekob	Ukir	Sunyar	Aktif
Distrik Biak Barat					
26.	Auyobo	Aktovianus Rejawu	Ukir dan Cenderamata	Wasyai	Aktif
27.	Insawairesi	Jhon Msen	Musik dan Tari	Benggor	Aktif
28.	Supri Manggun	Ruth Kmur	Musik dan Tari Wor	Sosmai	Aktif
29.	Aiberok	Hans Luther Dimara	Musik, Tari dan Ukir	Yomdori	Aktif
Distrik Biak Utara					
30.	Sarera	Novela Sanyar	Musik, Tari dan Ukir	Warsansan	Aktif
31.	Koyero Sarisa	Didimus Wonar	Musik dan Tari	Wari	Aktif
32.	Waworo Erisam	Otto Rumkabu	Musik dan Tari	Dernafi	Aktif
Distrik Yawosi					
33.	Amsendi	Yuliana Rumabar	Musik dan Tari	Wonabraidid	Aktif
34.	Madirai	Yulius Fainsenem	Tari dan Ukir	Wasori	Aktif
Distrik Warsa					
35.	Manggawok	Manuel Msiren	Musik dan Tari	Maniri	Aktif
36.	Manbewor	Agustinus Rumere	Musik dan Tari	Kayomi	Aktif
37.	Sermaro	Wellem Wamaer	Musik dan Tari	Biawer	Aktif
38.	Amoi	Onesimus Mnusefer	Musik dan Tari	Amoi	Aktif
Distrik Bondifuar					
39.	Dobo	Isak Akobiarek	Tari	Dobo	Aktif
40.	Awedubori	Benny Amunauw	Tari	Wopes	Aktif
Distrik Numfor Barat					
41.	Asaibori	Elisa Mandowen	Musik dan Tari	Pomdori	Aktif

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.26
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2023
1	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan	Persen	39	33	85
2	Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	Sanggar	38	41	30

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor 2020



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya apresiasi masyarakat terhadap penggalian perlindungan dan pelestarian asset budaya dan sejarah;
- 2) Adanya dukungan wadah dan media para pelaku budaya dan seni untuk mengekspresikan karyanya dan melestarikan kebudayaan asli suku Biak.
- 3) Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif dari Target 8 Sanggar Seni Budaya Terealisasi 41 Sanggar Seni Budaya atau mencapai 100%, hanya saja semua sanggar seni tersebut masih banyak memerlukan sentuhan perhatian dari pemerintah daerah untuk terus dapat menjaga kelestarian kebudayaan lokal asli Biak.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan ada beberapa upaya yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 adalah:

- 1) Melakukan penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih rasional dengan mengacu pada realisasi tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019);
- 2) Melaksanakan reviu terhadap sistem dan peraturan perundangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang



cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai;

- 5) Pemantapan sistem, kelembagaan dan operasional pemungutan pendapatan daerah, Pengembangan koordinasi secara sinergis pada bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, OPD Penghasil serta mitra kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat.

1. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 secara rinci terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			S/D Periode lalu	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.225.712.623.032,27	0,00	883.756.607.137,85	883.756.607.137,85	(341.956.015.894,42)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.143.740.950,98	0,00	18.040.191.517,23	18.040.191.517,23	(84.103.549.433,75)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.605.329.594,20	0,00	9.872.322.402,00	9.872.322.402,00	2.266.992.807,80
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.616.791.515,80	0,00	3.744.748.269,00	3.744.748.269,00	127.956.753,20
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	1.635.084.859,00	1.635.084.859,00	1.635.084.859,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.921.619.840,98	0,00	2.788.035.987,23	2.788.035.987,23	(88.133.583.853,75)
4.2	DANA PERIMBANGAN	819.025.379.835,00	0,00	808.187.330.373,00	808.187.330.373,00	(10.838.049.462,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	49.724.011.835,00	0,00	44.641.886.953,00	44.641.886.953,00	(5.082.124.882,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	544.038.318.000,00	0,00	537.802.482.000,00	537.802.482.000,00	(6.235.836.000,00)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	225.263.050.000,00	0,00	225.742.961.420,00	225.742.961.420,00	479.911.420,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304.543.502.246,29	0,00	57.529.085.247,62	57.529.085.247,62	(247.014.416.998,67)
4.3.1	Pendapatan Hibah	29.093.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(29.093.200.000,00)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.715.866.020,00	0,00	18.270.448.680,00	18.270.448.680,00	(3.445.417.340,00)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.258.636.567,29	0,00	32.258.636.567,62	32.258.636.567,62	0,33
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.537.321.659,00	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	(7.537.321.659,00)
4.3.6	Pendapatannya Lainnya	206.938.478.000,00	0,00	0,00	0,00	(206.938.478.000,00)

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2020



1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai berakhirnya TA. 2020 sebesar Rp. 18.040.191.517,- (Delapan Belas Miliar Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus tujuh Belas Rupiah) yang terdiri atas Realisasi :

- Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 872.322.402
- Hasil Retribusi Daerah Rp. 3.744.748.269
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 1.635.084.859
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 2.788.035.987

2) Pendapatan Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan sampai berakhirnya TA. 2020 sebesar Rp. 808.187.330.373 (Delapan Ratus Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas realisasi :

- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 4.641.886.953
- Dana Alokasi Umum Rp. 537.802.482.000
- Dana Alokasi Khusus Rp. 225.742.961.420

Sedangkan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir TA. 2020 sebesar Rp. 57.529.085.247 (Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).



2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Penyebaran Wabah Covid 19 telah membawa tantangan dan resiko baru, wabah ini mengganggu aktifitas ekonomi termasuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- Seperti tahun sebelumnya bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan potensi Pendapatan Asli daerah yang ada belum sepenuhnya dioptimalkan, sedangkan potensi yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan secara optimal khususnya aset daerah yang dimiliki;
- Manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal, efisien dan efektif;
- Kualitas sumber daya manusia belum memadai sehingga kurang berkembangnya upaya peningkatan ekonomi lokal;
- Sistem Adminitrasi Pemerintahan yang belum tertata dengan baik, sehingga pelaksanaan reformasi anggaran daerah belum optimal;
- Kualitas layanan publik yang masih rendah menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif;
- Kesadaran dari wajib pajak dan wajib retribusi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
- Belum siapnya Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada wajib pajak dan wajib retribusi bahwa uang yang dipungut memberikan manfaat pada masyarakat pada umumnya;



- Tingkat persaingan antar daerah dalam meraih peluang semakin tajam;
- Kondisi perekonomian, dan permasalahan tanah, sehingga menghambat keinginan investor untuk menanamkan modal di daerah

2) Solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan prospek pengembangannya;
- Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas pendidikan sesuai spesifikasi/kebutuhan daerah;
- Peningkatan kualitas jasa pelayanan publik dan perluasan jaringan sistem pelayanan;
- Penguatan dan pengembangan basis ekonomi rakyat dan perluasan lapangan kerja melalui Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mengatasi dampak ekonomi;
- Pengembangan dan mempercepat pengadaan infrastruktur dasar publik yang diarahkan guna mendukung pengembangan wilayah; dan
- Peningkatan pembangunan pada desa melalui dana desa dan alokasi dana desa;
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban melalui penegakan peraturan daerah melalui sosialisasi



3. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk:

- 1) Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), maka orientasi penganggaran guna belanja daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang & jasa non investasi, belanja pemeliharaan, pembayaran bunga hutang, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial.



a) Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam pengertian tersebut uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai yang bersifat tetap (*fixed cost*).

Realisasi belanja pegawai secara keseluruhan sampai dengan Akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp.363.365.306.911 atau 95,58% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 380.133.079.328

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian



dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Untuk belanja barang dan jasa sampai dengan akhir tahun 2020 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 340.727.391.574 telah direalisasi sebesar Rp. 207.682.249.003 atau mencapai 60,95%.

c) Belanja Hibah.

Belanja hibah ini digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Masing-masing dengan kriteria sebagai berikut:

- ✓ Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- ✓ Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- ✓ Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



Untuk Belanja hibah Tahun Anggaran 2020 telah realisasi sebesar Rp. 69.024.600.000 atau mencapai 85,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 80.962.000.000

d) Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial (bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, namun Pemerintah Daerah pada APBD 2020 mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial tersebut. Sebesar Rp. 17.750.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.750.000.000 atau 100%.

2) Belanja Modal

Belanja Modal Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (Dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Yang diharapkan berdampak pada meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai Rp. 119.933.207.485 atau ekuivalen 78,25% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 153.259.836.055



3) Belanja Tidak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, termasuk wabah pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020, untuk belanja tidak terduga sampai dengan akhir tahun 2020 realisasinya Rp. 10.000.000.000 atau mencapai 95,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 10.500.000.000

4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

5) Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, untuk bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sampai dengan akhir Tahun 2020 realisasinya mencapai 99,24% atau sebesar Rp. 42.706.218.000 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 43.031.904.239



Tabel 3.28
Target Dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			S/D Periode lalu	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	1.329.620.925.880,33	0,00	917.044.509.366,00	917.044.509.366,00	(412.576.416.514,33)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	743.372.940.167,98	0,00	513.844.033.311,00	513.844.033.311,00	(229.528.906.856,98)
5.1.1	Belanja Pegawai	380.133.079.328,18	0,00	363.365.306.911,00	363.365.306.911,00	(16.767.772.417,18)
5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	80.962.000.000,00	0,00	69.024.600.000,00	69.024.600.000,00	(11.937.400.000,00)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.750.000.000,00	0,00	17.750.000.000,00	17.750.000.000,00	0,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah	210.995.956.600,00	0,00	10.997.908.400,00	10.997.908.400,00	(199.998.048.200,00)
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	43.031.904.239,80	0,00	42.706.218.000,00	42.706.218.000,00	(325.686.239,80)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.500.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(500.000.000,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	586.247.985.712,35	0,00	403.200.476.055,00	403.200.476.055,00	(183.047.509.657,35)
5.2.1	Belanja Pegawai	92.260.758.082,00	0,00	75.585.019.567,00	75.585.019.567,00	(16.675.738.515,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	340.727.391.574,43	0,00	207.682.249.003,00	207.682.249.003,00	(133.045.142.571,43)
5.2.3	Belanja Modal	153.259.836.055,92	0,00	119.933.207.485,00	119.933.207.485,00	(33.326.628.570,92)
	SURPLUS/ DEFISIT	(103.908.302.848,06)	0,00	(33.287.902.228,15)	(33.287.902.228,15)	70.620.400.619,91

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020

4. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah,



hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan mencakup :

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
- b) Pencairan dana cadangan
- c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Penerimaan pinjaman daerah
- e) penerimaan kembali pemberian pinjaman
- f) penerimaan piutang daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a) Pembentukan dana cadangan
- b) Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah
- c) Pembayaran pokok utang
- d) Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.24 berikut:



Tabel 3.29
Pembiayaan Daerah Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	104.844.002.848,06	0,00	0,00	0,00	(104.844.002.848,06)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.293.547.694,51	0,00	0,00	0,00	(60.293.547.694,51)
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	44.550.455.153,55	0,00	0,00	0,00	(44.550.455.153,55)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	935.700.000,00	0,00	935.700.000,00	935.700.000,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	935.700.000,00	0,00	935.700.000,00	935.700.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	103.908.302.848,06	0,00	(935.700.000,00)	(935.700.000,00)	(104.844.002.848,06)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	(34.223.602.228,15)	(34.223.602.228,15)	(34.223.602.228,15)

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020

Kondisi yang tidak bisa dihindari terkait besarnya defisit APBD Tahun Anggaran 2020 dan beban hutang daerah kepada pihak ketiga yang cukup tinggi menjadi permasalahan utama pembiayaan yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kedepan.

1. Permasalahan Utama Penerimaan Pembiayaan.

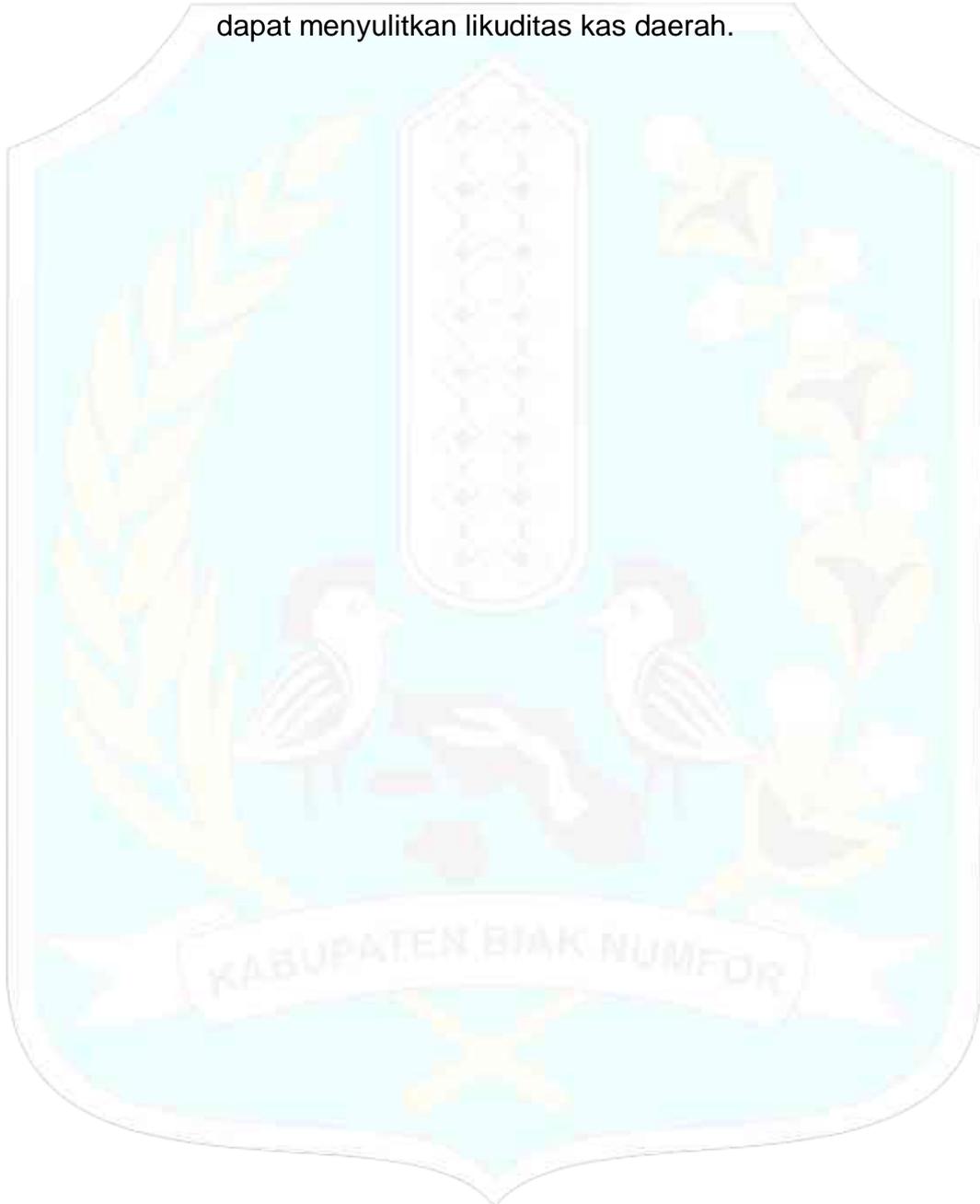
Permasalahan utama penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2020 terkait rencana Pemerintah Daerah melakukan pinjaman daerah sebagai sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Defisit anggaran melebihi batas kumulatif defisit akan menyulitkan pemerintah daerah dalam mencari sumber penerimaan pembiayaan daerah, baik yang berbentuk hibah maupun dalam bentuk pinjaman daerah.

2. Permasalahan Utama Pengeluaran Pembiayaan

Besarnya jumlah hutang daerah kepada pihak ketiga, menjadi permasalahan pengeluaran pembiayaan, karena tidak seimbang dengan penerimaan pembiayaan riil. Beban hutang daerah berdampak luas terhadap



tatakelola keuangan daerah dan membatasi akselerasi pembangunan pemerintah daerah. Rencana pinjaman daerah jangka pendek berdampak pada kewajiban pembayaran pokok hutang dan bunga pinjaman yang dapat menyulitkan likuiditas kas daerah.





BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor disusun sebagai wujud berkembangnya akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2020 Rp. 1.225.712.623.032,27 terealisasi Rp. 883.756.607.137,85 atau 72,10%. Disisi yang lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 102.143.740.950 terealisasi Rp. 18.040.191.517 atau 17,66%.

Terkait upaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2019 yang telah diambil dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yaitu melakukan pengintegrasian dan pemanfaatan sistem informasi dalam penilaian kinerja OPD melalui kegiatan evaluasi kinerja (fisik dan keuangan).

Disamping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat keterkaitan indikator kinerja OPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja).

Untuk menyajikan capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), serta diterapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja *online* yang berbasis website. Langkah ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan public dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.



Kami berharap melalui pelaksanaan SAKIP yang terus disempurnakan akuntabilitas kinerja aparatur dan pemerintah daerah dapat diterima oleh Pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik.

Atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dukungan instansi lain serta masyarakat semoga hasil evaluasi kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan mengalami peningkatan.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, peningkatan akuntabilitas kinerja mampu mempercepat perwujudan masyarakat Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian.

Biak, 23 Maret 2021

BUPATI BIAK NUMFOR

HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.



LAMPIRAN



BUPATI BIAK NUMFOR

Jl. Majapahit 01 Biak Telepon/Fax : 0981-21688 / 21524

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.

Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Biak, 9 Maret 2020
BUPATI BIAK NUMFOR



HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Predikat AKIP Kabupaten	C
		2. Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	WDP
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	4,678%
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,8 Tahun
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	1. APK PAUD	14,58
		2. APK SD/ MI	96,49
		3. APK SMP/ MTs	88,87
		4. APM SD/ MI	82,17
		5. APM SMP/ MTs	81,06
		6. Rasio Guru Berpendidikan D4/ S1	45
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	67,856 Org
		2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	83,613 Ton
		3. Tingkat Konsumsi Ikan	47,3%
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	471 Org
		2. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	12 Org
7	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	17,60%
		Capaian Jumlah Peserta KB	54,01 %
		Presentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	54,4%
8	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang Dilestarikan	70%
		Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	8 Sanggar

Biak, 9 Maret 2020
BUPATI BIAK NUMFOR



HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
INSPEKTORAT**

Jl. Majapahit, Telpn (0981) 21981
BIAK - PAPUA

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dibuat dalam kinerja yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Biak, Maret 2021
**INSPEKTUR
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**MAHASUNU, S.IP.
PEMBINA TK. I
NIP. 19621219 198603 1 018**